IDN/ANTARA

PENJUALAN BUKU BACAAN DI JOMBANG

Pengunjung memilih buku di gedung Dekopinda Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (5/7). Menurut penjual meski saat ini minat membaca turun seiring perkembangan teknologi, namun dalam sehari masih bisa terjual 30-50 buah buku mulai novel, komik maupun buku cerita anak dengan harga Rp5 ribu sampai Rp35 ribu.

Jutaan Warga Banten Terjerat Pinjol, Ini Reaksi Pj Gubernur Banten

Masyarakat agar berhati-hati berutang ke pinjaman online alias Pinjol, meskipun ini instrumennya teknologi, tetapi tetap harus arif dan bijaksana memanfaatkannya. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu menjadi sesuatu yang merugikan kita, kata Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar.

SERANG (IM)- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini merilis data, bahwa per Mei 2023 terdapat 1,48 juta warga Banten berutang ke pinjaman online alias Pinjol.

Nominal pinjaman dari 1,48 juta warga Banten itu tidak tanggung-tanggung. Total pinjaman mencapai Rp 4,51 triliun.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, pun bereaksi. Ia mengingatkan warga Banten harus lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi, khususnya dalam menggunakan Pinjol.

"Saya ingin mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati meskipun ini instrumennya teknologi ya, tetapi tetap harus arif dan bijaksana memanfaatkannya. Sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak menjadi sesuatu yang merugikan diri kita dan mari kita bersama untuk menghindarinya," kata Al Muktabar saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (5/7).

Al mengatakan, teknologi bisa menjadi pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, maka akan membawa manfaat. Namun, jika tidak digunakan secara bijaksana, bisa sebaliknya.

"Dalam rangka pemanfaatan hal-hal yang dipandang sebagai support penyelesaian satu situasi keadaan tapi kalau kita tidak ada dan bijaksana bisa menjadi masalah dan beban buat individu maupun bisa menjadi beban Pemerintah. Karena kembali lagi keterkaitan secara langsung bisa saja itu terjadi tetapi membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan kita secara individu untuk bersikap atas situasi apapun," ungkapnya.

Ketika disinggung perihal banyaknya warga Banten terjerat Pinjol karena tingginya tingkat pengangguran, Al mengatakan, walaupun secara kuantitas jumlah pengangguran di Banten tinggi, namun secara penyelesaiannya terdapat tren menurun.

Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari kondisi Banten yang juga menjadi daerah tujuan pencari kerja dari berbagai daerah.

"Dalam berbagai kesempatan selalu saya sampaikan dan kita tidak bisa membatasi bahwa Banten tidak menjadi tempat mencari kerja di Indonesia, tapi kita juga terbuka dan pemerintah daerah terus berusaha untuk mengentaskan permasalahan pengangguran itu," pungkasnya. ● **pra**

Masih Ditemukan Masyarakat Mengakali Syarat PPDB

SERANG (IM)- Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Yeremia Mendrofa melakukan pantauan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA negeri di Banten tahun ajaran 2023/2024. Seperti diketahui, saat ini masih dibuka PPDB SMA negeri jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.

Berdasarkan pantauan Yeremia di sejumlah SMA negeri, ia menemukan masih adanya masyarakat yang 'akali' syarat agar diterima. "Di jalur perpindahan orang tua, banyak terlihat surat tugas warga luar Banten tugas di Jakarta, tapi tinggal sementara dekat sekolah," ungkap Yeremia, Rabu (5/7).

Ia mengaku banyak melihat para manager pegawai swasta melampirkan surat tugas pindah dekat wilayah sekolah. Untuk itu, Yeremia menilai perlu verifikasi faktual sehingga memperkecil ruang 'akal-akali' itu.

Secara keseluruhan, politikus PDIP ini menilai PPDB tahun ini berjalan lancar dan warga terlayani dengan baik. "Melalui online tidak ada hambatan dan juga dgn verifikasi faktual," ujar Yeremia.

Kata dia, ada beberapa perbedaan pola verifikasi di masing-masing sekolah yang menyesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekolah. Namun, sebaiknya ini diseragamkan. "Misalnya ada sekolah yang meminta semua peserta zonasi untuk hadir verifikasi jarak, ada yang meminta sebagian untuk jarak dekat saja. Untuk prestasi ada sekolah yang melakukan test uji verifikasi kompetensi ada juga yang hanya dengan cek berkas," tuturnya.

Selain itu, lanjut Yeremia, jalur prestasi banyak terlihat sertifikat prestasi yang tidak berjenjang, yakni kompetisi dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, internasional. "Tapi karena nama kompetisi tersebut ada tertulis international championship dianggap nilainya setara dengan tingkat internasional, sehingga poinnya besar atau ada kejuaraan even tertentu atau tidak berjenjang, tapi namanya atau diselenggarakan, misalnya lembaga pusat meng-klaim poin tingkat nasional, yang sesungguhnya kejuaraan tersebut tidak sebanding dengan misalnya PON," ujarnya. ● **pra**

Pemkab Lebak Bentuk Tim Khusus TPPO untuk Tangkal Modus Perdagangan Orang

LEBAK (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akan membentuk tim khusus untuk menangkal berbagai modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Asda I Bidang Pemerintahan, Setda Kabupaten Lebak, Alkadri mengatakan, dalam menangani kasus TPPO saat ini Pemkab Lebak telah membentuk tim khusus. "Kita membentuk Tim TPPO, jadi itu ada di Disnaker Lebak, tetap segala kegiatan dikoordinasikan," katanya, Rabu (5/7).

Ia menjelaskan, Tim Khusus TPPO tersebut berada di Disnaker Lebak dalam penanganan kasus perdagangan orang. "Tentu kami dari Pemerintah Daerah tetap mengkoordinasikan segala hal yang perlu kami lakukan," jelas Alkadri.

Diungkapkan Alkadri, akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui informasi dan tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan. "Termasuk kami melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan," ungkapnya.

Ditambahkan Alkadri, ada dua alasan kenapa banyak masyarakat tergiur dan masuk dalam perangkap perdagangan orang. "Artinya begini, kenapa banyak orang yang tertipu, yang pertama karena banyak yang tidak tahu, dan yang kedua karena butuh pekerjaan," katanya.

Diharapkan masyarakat bisa mencari pekerjaan di wilayah Kabupaten Lebak, tidak mencari hingga ke luar negeri. "Sehingga, kami berharap juga diutamakan dulu di lokal, kalau memang ada lapangan kerja atau perusahaan di lokal kita dorong ke sana," ucapnya. ● **pp**

Ganggu Fungsi RTH, Warga Minta Bangli di Bantaran Sungai Pakuhaji Dibongkar

TANGERANG (IM)- Sejumlah warga di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membongkar bangunan liar (bangli) yang berdiri di bantaran sungai.

Pasalnya, keberadaan bangli tersebut selain melanggar aturan juga menghilangkan fungsi ruang terbuka hijau (RTH).

Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pecinta Sungai Cisadane (FMPSC) itu, menyampaikan keluhannya di Ruang Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (5/7).

"Pada intinya kami minta agar bisa dikembalikan fungsi RTH, mengingat saat ini sudah menyempit, dan menurut kami masyarakat Pantura setuju dengan hal ini," kata Ketua FMPSC Pakuhaji Yusin.

Jika bangli dibongkar, kata Yusin, RTH tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga setempat atau kawasan Utara Kabupaten Tangerang, untuk dijadikan wisata keluarga.

Selain itu, juga dapat menjadi area tumbuhnya perekonomian sekitar dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Yusin berharap, pemerintah daerah dan juga pihak terkait, bisa lebih tegas untuk segera melakukan penertiban bantaran sungai.

"Nantinya kalau sudah terbentuk RTH bisa dimanfaatkan, asal jangan dibuat bangunan permanen," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satpol PP Kabupaten Tangerang, Syahdan Muchtar mengatakan, pihaknya tidak dapat begitu saja mengambil langkah pembongkaran paksa.

Sebab jika berbicara standar operasional prosedur (SOP), pihaknya perlu memberi kali teguran terlebih dahulu.

Kemudian, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat sekitar bantaran, dan juga imbauan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

"Sebenarnya mereka paham telah melanggar Peraturan Daerah, kendati demikian kami tidak mau mengambil langkah yang berimbas pada persoalan hukum," ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail mendorong Satpol PP segera mengambil langkah tegas dan terukur.

Karena, berdasarkan hasil kesepakatan RDP, dalam kurun waktu satu bulan kedepan sudah harus adanya penertiban terhadap bangunan yang berada di bantaran Cisadane Pakuhaji.

"Sepakat ya, kita berikan waktu 1 bulan, Satpol PP harus sudah lakukan penertiban," pungkasnya. ● **pp**

PEMBERITAHUAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat 7 dan 8 juncto Pasal 127 ayat 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dengan ini Direksi **PT. SOLUSI INTI MANUNGGAL ("Perseroan")** berkedudukan di Jakarta Utara, memberitahukan bahwa pemegang saham mengalihkan sebagian besar saham langsung dari pemegang saham.

Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditor Perseroan dan / atau pihak-pihak lain yang ingin mengajukan keberatan atas pengambilalihan saham tersebut agar disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada keberatan yang dilayani.

Jakarta, 06 Juli 2023
Direksi

AKAN ADA RIBUAN ANAK MASUK SMP SWASTA

Tiga Hari, 8.052 Lulusan SD di Kota Serang Daftar SMP Negeri

SERANG (IM)- Dalam waktu tiga hari, ada 8.052 calon siswa SMP di Kota Serang mendaftar ke SMP negeri. Sementara, lulusan sekolah dasar (SD) di Kota Serang pada tahun 2023 ada 12.632 anak.

Wali Kota Serang, Syafrudin mengatakan, dari sebanyak 12.632 siswa yang lulus SD itu, baru sekitar 8.052 siswa yang mendaftar ke SMP negeri.

"Lulusan SD di Kota Serang jumlahnya 12.632, yang baru daftar saat ini hanya 8.052, jadi belum sampai 12 ribu," ujar Syafrudin saat melakukan monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Rabu (5/7).

Syafrudin menduga, ada 4.000 lebih lulusan SD yang belum mendaftar SMP negeri itu akan memasuki sekolah swasta.

"Ada kemungkinan yang empat ribu ini langsung masuk ke (SMP) swasta. Sebab hari ini hari ketiga, besok itu penutupan," katanya.

Syafrudin menuturkan, untuk daya tampung SMP negeri di Kota Serang hanya sekitar 6.534. Artinya, akan ada 1.000 lebih lulusan SD yang sudah mendaftar ke SMP negeri, harus beralih ke sekolah swasta.

"Kemudian daya tampung untuk SMP negeri di Kota Serang semuanya 6.534. Jadi kalau dari jumlah yang daftar, ini dua ribu kurang harus ke SMP swasta," tuturnya.

Syafrudin menjelaskan, kemampuan kuota tersebut tidak hanya terjadi di Kota Serang saja, namun juga terjadi di daerah lainnya se-Indonesia.

"Saya berharap kepada masyarakat Kota Serang, karena kemampuan kuota tentu bukan Kota Serang saja, akan tetapi semua Kabupaten/Kota se-Indonesia kemampuan untuk menampung supaya masuk negeri semua nampaknya tidak ada," katanya.

Syafrudin meminta, kepada seluruh orang tua siswa jangan sampai anaknya berhenti sekolah meskipun tidak tertampung di sekolah negeri.

"Oleh karena itu yang tidak tertampung ke negeri saya mohon anaknya jangan sampai berhenti sekolah. Ada jalan keluar, banyak SMP swasta malah yang berprestasi," ucapnya.

Sedangkan untuk SD, Kota Serang hanya bisa menampung sekitar 12.692 di SD negeri. Untuk PPDB SD, Syafrudin menyebut, hingga saat ini tidak ada masalah.

"Kemudian masyarakat Kota Serang yang sekarang akan masuk ke SD, daya tampung di SD hanya 12.692 dari sekian SD yang ada di Kota Serang. Yang umur tujuh tahun sudah akan masuk ke SD mungkin lebih dari 12 ribu. Untuk SD tidak ada masalah, yang diperebutkan itu yang SMP yang ingin masuk negeri," ujarnya. ● **pra**

IDN/ANTARA

PURWARUPA ROBOT PENYELAMAT BUATAN MAHASISWA

Mahasiswa menunjukkan cara kerja purwarupa robot penyelamat atau Search and Rescue (SAR) rakitannya yang diberi nama Dome di Bengkel Robotika, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Rabu (5/7). Purwarupa robot penyelamat yang menjadi karya terbaik di ajang Kontes Robot SAR Indonesia tersebut dilengkapi sensor ultrasonik dan infra merah sehingga mampu melakukan pencarian sekaligus penyelamatan korban di daerah bencana gempa bumi serta tanah longsor.

IDN/ ANTARA

WARGA KELUHKAN SISTEM ZONASI PPDB DI BANTEN

Petugas Dinas Pendidikan Kota Serang (kiri) menjelaskan prioritas jarak rumah ke sekolah saat menerima keluhan orang tua calon siswa baru (kanan) yang mengalami kesulitan saat mendaftar ke sekolah yang dituju dengan sistem zonasi di Serang, Banten, Rabu (5/7). Wali Kota Serang memerintahkan stafnya untuk membantu kesulitan warga dan membuka secara transparan proses penerimaan siswa baru untuk diketahui publik secara luas untuk menghindari terjadinya kecurangan.

Diprediksi Naik 1.000 Persen, Pemkot Kaji Kebijakan Parkir Berlangganan

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah mengkaji kebijakan penerapan parkir berlangganan di Kota Bandung. Hal ini sebagai upaya strategi untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menginstruksikan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung untuk melakukan kajian mendalam terkait penerapan parkir berlangganan tersebut. "Kalau berbicara potensi parkir seharusnya kita mempunyai target pendapatan yang luar biasa. Saya minta Dishub maksimalkan strategi untuk bagaimana kita mewujudkan rencana penerapan parkir berlangganan," kata Ema Sumarna, Rabu (5/7).

Ema Sumarna menilai, apabila parkir berlangganan tersebut diberlakukan maka akan meningkatkan potensi pendapatan parkir lebih dari 1.000 persen. "Karena parkir berlangganan ini menurut saya akan mendongkrak mungkin diatas 1.000 persen kalau serius. Karena jumlah kendaraan roda empat dan dua di Kota Bandung itu luar biasa," ucapnya.

Data menunjukan, jumlah kendaraan di Kota Bandung untuk roda empat mencapai 500 ribu kendaraan. Sedangkan untuk roda dua mencapai 1,7 juta kendaraan. "Nanti kalau kita konversi misalnya roda empat 200 ribu per tahun, kemudian 50-100 ribu per tahun untuk roda dua sudah jelas ada angka kasar sudah 200 milyar potensi retribusi dari parkir," ujar dia.

Ema menyebut, potensi retribusi ini harus sangat dimanfaatkan. Menurutnya, dengan penambahan pendapatan maka dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menggulirkan berbagai program. "Tentunya ini satu peluang yang sangat luar biasa, saya minta dibahas serius oleh Dishub karena ini jadi bagian strategi yang signifikan pada saat kita ingin mendongkrak pendapatan. Pada hakikatnya ini untuk kepentingan kebutuhan belanja untuk urusan wajib layanan dasar maupun urusan wajib non layanan dasar, termasuk juga ada tugas lain yang biasa diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah kota," tandasnya. ● **pra**